

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pakaian jadi merupakan salah satu bagian dari subsektor industri tekstil dan produk tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Industri ini memiliki pertumbuhan paling tinggi pada triwulan III tahun 2019 sebesar 15,08 persen serta capaian itu melebihi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen pada periode yang sama. Industri tekstil dan produk tekstil tingkat nasional makin kompetitif di pasar internasional dikarenakan mempunyai daya saing tinggi yang didorong oleh struktur industri yang sudah terintegrasi. (Kemenperin, 2019).

Ekspor pakaian jadi juga menjadi *share* tiga terbesar pada bulan Januari-Juni 2020 dengan angka US\$59,8 Juta atau 33,54% dari komoditas ekspor di Yogyakarta secara keseluruhan. (BPS DIY, 2020). Dengan melihat potensi yang besar dari ekspor pakaian jadi di Indonesia khususnya Yogyakarta ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beserta dengan beberapa kementerian lain memberikan kebijakan ekonomi berupa dukungan dan juga fasilitas.

Dalam hal kepabeanan, fasilitas kepabean merupakan kemudahan berupa pemberian insentif oleh pemerintah/DJBC terkait dengan kegiatan ekspor dan

impor. Diharapkan dengan kemudahan yang ada memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011). Salah satu fasilitas tersebut adalah kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat yang difungsikan untuk penimbunan barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya sebagian besar untuk diekspor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. (Peraturan Menteri Keuangan, 2018).

Perencanaan pemberian fasilitas kawasan berikat ini bukan tanpa alasan, dikarenakan volume ekspor pakaian jadi yang stabil dan tetap menunjukkan peningkatan meskipun di masa pandemi. (BPS DIY, 2020). Fasilitas ini diberikan untuk perusahaan industri yang orientasi penjualan produknya untuk diekspor dan/atau dijual ke kawasan berikat yang lain. Bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor bisa mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan penangguhan dari bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh. (BC Ternate, 2018).

Selain dengan Kawasan Berikat, Kementerian Keuangan juga memberikan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) guna melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor. Pengenaan BMTP ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2020. (Peraturan Kementerian Keuangan, 2020). Peraturan ini dibuat dan diundangkan atas hasil penyelidikan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan terdapat kenaikan kembali pada impor bahan baku kain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

selama periode 2019-2021, telah terjadi penurunan jumlah impor produk kain dengan tren sebesar 21,56 persen. Pada 2019-2020, terjadi penurunan jumlah impor 42,58 persen. Namun pada 2020-2021, terjadi peningkatan jumlah impor sebesar 7,16 persen. Oleh karena itu BMTP masih perlu diterapkan hingga keadaan pasar dalam negeri menjadi stabil.

Diharapkan dengan pemberian fasilitas Kawasan Berikat dan penerapan BMTP ini dapat membantu perusahaan industri/manufaktur meningkatkan ekspor pakaian jadi dan menjaga industri dalam negeri khususnya produk kain lokal. (DDTC News, 2020).

Berdasarkan uraian dan data di atas, penulis mengangkat dan mengkaji mengenai pengaruh pemberian fasilitas kawasan berikat terhadap nilai ekspor industri pakaian jadi dan impor bahan baku. Selain itu, penulis juga berminat untuk membandingkan nilai ekspor dan impor tersebut saat sebelum diberlakukannya BMTP dan sesudahnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema fasilitas kepabeanan untuk pembuatan Karya Tulis Tugas Akhir yang terfokus pada pengaruh Kawasan Berikat dan BMTP terhadap industri pakaian jadi serta dampak yang diberikan terhadap nilai ekspor pakaian jadi dan impor bahan bakunya berkaitan dengan pemberian fasilitas dan pengamanan oleh pemerintah melalui DJBC, dengan judul *“ANALISIS DAMPAK PENGENAAN BMTP DAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT TERHADAP NILAI EKSPOR PAKAIAN JADI DAN IMPOR BAHAN BAKU KAIN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini :

1. Bagaimana pengaruh dan cara untuk memaksimalkan dampak dari pemberian fasilitas kawasan berikat terhadap nilai ekspor industri pakaian jadi dan nilai impor bahan baku kain?
2. Bagaimana kinerja industri pakaian jadi sebelum dan sesudah pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan pengaruh serta cara untuk memaksimalkan dampak dari fasilitas kawasan berikat terhadap nilai ekspor industri pakaian jadi dan nilai impor bahan baku kain di Yogyakarta.
2. Mengetahui kinerja industri sebelum dan sesudah pengenaan BMTP di Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup nilai ekspor pakaian jadi dan impor bahan baku dari industri pakaian jadi. Penelitian dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Selain nilai ekspor dan impor, dampak dari pemberian fasilitas kawasan berikat dan pengenaan BMTP terhadap industri ini juga tak luput dari penggunaan metode ini. Seluruh data yang diolah terbatas pada industri yang berada

di Yogyakarta. Kinerja yang diukur sebelum dan sesudah adanya pengenalan BMTP tersebut adalah:

- a) Nilai ekspor industri pakaian jadi.
- b) Nilai impor bahan baku kain.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan wawasan bagi pembaca mengenai fasilitas kawasan berikat dan BMTP, serta dampak positif yang diharapkan serta upaya optimalisasi dari pemberian tindakan tersebut kepada pengguna jasa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai pemecahan masalah yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (KPPBC TMP B Yogyakarta) dalam rangka mendorong pemanfaatan dan optimalisasi nilai ekspor dengan fasilitas serta tindakan pengamanan yang diberikan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana dampak sebelum dan sesudah dikenakannya BMTP serta upaya untuk meningkatkan fasilitas kawasan berikat bagi industri pakaian jadi.

b. Bagi instansi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC)

Sebagai instansi teknis yang menangani langsung perihal fasilitas kawasan berikat dan pengenalan BMTP, diharapkan DJBC semakin mengetahui kondisi di lapangan sehingga dapat menyusun strategi yang lebih efektif mengenai dampak dari pengenalan BMTP terhadap industri serta optimalisasi penerimaan fasilitas kawasan berikat kepada para pengguna jasa dan masyarakat, terutama untuk mendukung PMK terkait.

c. Bagi pengguna jasa

Dapat menambah pengetahuan mengenai dampak positif dari adanya kawasan berikat dan BMTP, sehingga minat untuk mengembangkan komoditas ekspor yang didukung dengan fasilitas ini semakin meningkat.

1.2 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB IV SIMPULAN